

Community Based Tourism Mendorong Pariwisata Berkelanjutan Wisata Kapalo Banda Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota

Qavka Navisa¹, Nurhaliza Maharani², Mutiara Mutiara³, Najwa Rosyidah⁴,
Letta Maharani⁵, Muhammad Rifat Armensyah⁶, Delmira Syafrini^{7*},
Bunga Dinda Pertama⁸, Fauzanah Fauzan El Muhammady⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan wisata Kapalo Banda atau yang dikenal dengan Wakanda (Wisata Alam Kapalo Banda) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata serta dukungan pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori agency Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, ditemukan masyarakat berperan sebagai agen penggerak kegiatan wisata, sedangkan pemerintah berperan sebagai stakeholder utama yang memberikan arahan dan dukungan terhadap pembangunan dan pengelolaan wisata kapalo banda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pemuda Jorong Tanjung Ateh memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam membangun serta mengelola kawasan wisata secara mandiri melalui sistem bagi hasil dan kegiatan gotong royong rutin yang dilakukan. Community Based Tourism tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat tetapi juga dampak lingkungan dan juga meningkatkan hubungan sosial diantara masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat; Pengelolaan; Pemerintah; Pembangunan berkelanjutan; Wisata.

Abstract

This study discusses how local communities are involved in managing Kapalo Banda tourism or what is known as Wakanda (Kapalo Banda Nature Tourism) in Lima Puluh Kota Regency. This study aims to determine the role and active involvement of the community in tourism management and the efforts made by the community in realizing sustainable tourism. This study uses a qualitative approach with agency theory, through observation, interviews and documentation it was found that the community acts as an agent driving tourism activities, while the government acts as the main stakeholder that provides direction and policies. The results of the study show that the community, especially the youth of Jorong Tanjung Ateh, have the initiative and responsibility to build and manage tourism areas independently through a profit-sharing system and routine mutual cooperation activities. Community Based Tourism not only provides economic impacts for the community but also environmental impacts and also improves social relations among the community. Challenges faced include the impact of forest fires which disrupt water sources, which has an impact on reducing the number of visitors.

Keywords: Government; Management; Public; Sustainable development; Tourism.

How to Cite: Navisa, Q. et al. (2025). Community Based Tourism mendorong Pariwisata Berkelanjutan Wisata Kapalo Banda Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025. (pp. 463-475). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengunjungi tempat tertentu di luar lingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan rekreasi, edukasi, maupun pengalaman budaya. Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, sosial, serta pelestarian budaya lokal. Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata menjadi sektor strategis yang mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkenalkan potensi wilayah kepada pasar yang lebih luas. Destinasi wisata menurut (Tohopi et al., 2025) mengatakan bahwa destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).

Community Based Tourism merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal di mana masyarakat turut andil dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian pendapat (Achmad, 2020). Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan. Pembangunan berkelanjutan ini menjadi strategi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan serta budaya bagi masyarakat lokal.

Perkembangan sektor pariwisata di berbagai daerah menunjukkan peningkatan yang sangat besar, termasuk di wilayah Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya destinasi wisata yang tumbuh dan dikelola secara kreatif oleh masyarakat sehingga mampu menarik minat wisatawan. Salah satu contohnya adalah objek wisata Kapalo Banda sering disebut Wakanda terletak di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kapalo Banda merupakan salah satu ekowisata yang terletak di Jorong Ateh, Nagari Taram, kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Wisata Kapalo Banda sudah dikenal sejak tahun 1980-an hingga awal 2000-an dengan kunjungan wisata yang terbatas pada wisatawan lokal. Namun, pengelolaan sempat mengalami hambatan di tahun 2010 dikarenakan kurangnya pengelolaan yang baik hingga penutupan sementara. Pada tahun 2012, pengelolaan kembali dibuka tetapi belum memiliki legalitas resmi, yang menimbulkan masalah seperti pungutan liar. Legalitas resmi baru diperoleh setelah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Nagari. Daya tarik utama wisata adalah keindahan alam dan wahana air yang aman dinikmati oleh keluarga dan anak-anak. Harga tiket dan fasilitas yang terjangkau menjadikan Kapalo banda salah satu destinasi favorit di Sumatera Barat. Harga tiketnya hanya Rp. 5000/orang dan harga makanan yang murah membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi kapalo banda. Tidak hanya wisata air, kapalo banda juga memiliki hutan pinus yang cocok dijadikan untuk spot foto dan bersantai bagi keluarga karena udaranya yang sejuk. Atraksi lain yang dapat dinikmati seperti rakit bambu, aliran sungai yang bisa dijadikan tempat berenang anak-anak, Jeep ATV, hingga area camping.

Dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan kegiatan pariwisata berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pemerintah juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan pengelolaan wisata, promosi destinasi, peningkatan infrastruktur, dan penyediaan aksesibilitas seperti transportasi dan jaringan komunikasi. Pariwisata ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah, namun peran masyarakat juga terlihat nyata melalui pembentukan kelompok pengelola yang berasal dari pemuda Nagari Taram, khususnya Jorong Tanjung Ateh. Mereka menjadi pihak yang mengatur sistem tiket masuk, mengelola wahana seperti rakit bambu dan ATV, menyediakan fasilitas istirahat, hingga bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan wisata setiap hari. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam pengembangan UMKM seperti warung makan, sewa rakit, jasa parkir, hingga penyediaan perlengkapan camping. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata tidak hanya memberikan rekreasi bagi pengunjung, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang memperkuat perekonomian lokal.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kapalo Banda tidak terlepas dari penerapan konsep Community Based Tourism (CBT) yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan destinasi. Pengelolaan wisata dipimpin oleh pemuda Nagari Taram khususnya Jorong Tanjung Ateh sebagai penggerak utama, mulai dari pengelolaan tiket masuk, fasilitas wisata, atraksi rakit bambu, hingga menjaga kebersihan lingkungan wisata secara rutin. Penerapan CBT juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, seperti penyediaan UMKM bagi pemilik tanah ulayat, pedagang kaki lima, hingga pemilik rakit yang memanfaatkannya sebagai atraksi wisata. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil wisata, tetapi juga aktor penting dalam keberlanjutan Kapalo Banda sebagai destinasi wisata alam berbasis pemberdayaan lokal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan pariwisata berbasis masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan pengelolaan wisata. (Kesejahteraan et al., 2023) menjelaskan bahwa Community Based Tourism (CBT) serta kemitraan memiliki pengaruh

positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kapalo Banda, Nagari Taram. Hal serupa diungkapkan oleh (Vidya Yanti Utami et al., 2022) yang menemukan bahwa pelaksanaan CBT di Desa Wisata Kebon Ayu mampu mendorong pemberdayaan sosial ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, perbaikan kualitas hidup, serta tumbuhnya rasa bangga dan komitmen masyarakat dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Sementara itu, (Aina & Manurung, 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di objek wisata Tangkahan mendapatkan penilaian baik pada aspek pelayanan, fasilitas, dan atraksi wisata, meskipun jumlah wisatawan sempat menurun akibat kebijakan pembatasan selama masa pandemi. Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menegaskan peran penting CBT dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata. Penelitian (Eko, 2017) juga menjelaskan bahwa pengelolaan fasilitas wisata Kapalo Banda masih menghadapi kendala teknis, seperti kamar bilas yang kurang optimal, kebersihan mushola yang belum terkelola, dan kios souvenir yang tidak aktif. Meski ada beberapa perbaikan, penelitian ini belum membahas keterlibatan masyarakat atau sistem bagi hasil dalam kerangka CBT. Sementara itu, penelitian oleh Sutisna et al, (2024) menegaskan bahwa masyarakat khususnya pemuda Karang Taruna memiliki peran penting dalam mengelola Kapalo Banda melalui lima bentuk peran: pemrakarsa, pelaksana, penyerta, pengawas, dan penerima manfaat. Namun, penelitian tersebut masih fokus pada gambaran umum peran masyarakat.

Meskipun penelitian sebelumnya membahas topik yang sama mengenai Community Based Tourism (CBT), penelitian ini dilakukan dengan fokus kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya mengamati hasil dan manfaat penerapan CBT, melainkan menganalisis proses pengelolaan, bentuk partisipasi masyarakat, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberlanjutan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru yang lebih luas dalam memahami pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus memperluas pemahaman terhadap dinamika sosial dan keberlanjutan wisata yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada pengelolaan wisata Kapalo Banda sebagai bentuk wisata berbasis masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2025 dengan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi untuk melihat bagaimana kawasan wisata dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan subjek yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan wisata, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan relevan. Informan yang diwawancarai meliputi ketua pengelola Kapalo Banda, pedagang dari masyarakat pemilik tanah ulayat, serta pengunjung yang sedang melakukan aktivitas wisata untuk memperoleh pandangan yang beragam. Pengumpulan data juga diperkuat dengan dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan arsip pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi temuan. Seluruh data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara tematik melalui tahap reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai pola pengelolaan serta keterlibatan masyarakat dalam keberlangsungan wisata Kapalo Banda.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Lingkungan Wisata Melalui Kegiatan Gotong Royong

Pemberdayaan lingkungan terkhususnya pada Wisata Kapalo Banda Taram tentu menjadi hal yang sangat diutamakan, terutama pada wisata yang masuk ke dalam kategori alam. Wisata alam yang tentu memiliki korelasi yang sangat erat dengan yang namanya kehidupan manusia. Sehingga besar kemungkinan suatu lingkungan untuk tercemar, rusak ataupun tidak terjaga akibat ulah tangan manusia. Sehingga sebagai pengelola atau penjaga wisata tentu memiliki cara untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan alam nya, dengan cara gotong royong. Gotong Royong adalah kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, dengan memastikan kebersihan lingkungannya, menjaga alamnya agar tidak dirusak oleh oknum liar, dan bahkan melakukan kegiatan penghijauan demi melanjutkan keasrian alam agar bisa bertahan lama. Khususnya pada Wisata Kapalo Banda ini yang dimana pihak pengelola bekerja sama dengan pihak masyarakat demi menjaga kelestarian dan keberlanjutan wisata alam. Gotong royong menjadi salah satu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata kapalo banda, kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan melibatkan masyarakat, hal tersebut disampaikan oleh informan , yaitu Gio (28 Tahun) sebagai ketua pengelola kapalo Banda Taram.

“....Kalo gotong royong itu kami ada dua versi... setiap hari Jum’at pagi kami fokus pada pembangunan seperti pengambilan spot foto, tempat duduk yang udah lapuk diganti, dan kalo di dalam itu ada yang perlu dicat, maka dicat tu pagi itu... di hari Jum’at itu kami lebih fokus pada pembangunan, membuat taman...” (Wawancara 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gio (28 tahun) bahwa gotong royong bukan hanya kegiatan rutin, tetapi memiliki struktur kerja yang jelas. Terdapat dua bentuk gotong royong harian dan mingguan. Pada hari Jumat, masyarakat fokus pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas. Aktivitas seperti memperbaiki spot foto, mengganti bangku yang rusak, mengecat area dalam, hingga membuat taman baru memperlihatkan kesadaran masyarakat terhadap estetika wisata. Kegiatan ini menggambarkan bahwa masyarakat memiliki cara pandang yang tidak hanya berfokus pada manfaat wisata saat ini tetapi juga mempertimbangkan kualitas wisata di masa mendatang dengan merawat dan melestarikan lingkungan. Mereka memahami bahwa fasilitas yang baik akan meningkatkan kepuasan wisatawan. Ini sejalan dengan konsep *community based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dalam pemeliharaan fasilitas destinasi. Wawancara ini juga menunjukkan gotong royong di Kapalo Banda telah berkembang menjadi sistem kerja yang lebih terorganisir, bukan sekadar gotong royong spontan. Ini adalah bukti bahwa struktur sosial di Nagari Taram telah bertransformasi mengikuti kebutuhan wisata tanpa meninggalkan nilai asli gotong royong.

Dalam penyelenggaraan wisata, pemeliharaan kebersihan lingkungan merupakan komponen kritis yang secara langsung mempengaruhi tingkat kenyamanan pengunjung dan keberlanjutan daya tarik suatu destinasi. Destinasi wisata alam seperti Kapalo Banda, yang mengalami tekanan kunjungan tinggi, menuntut sistem manajemen dan perawatan yang teratur dan konsisten untuk memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga. Kegiatan pemeliharaan tidak dapat bersifat insidental atau reaktif, melainkan harus diintegrasikan ke dalam operasional harian sebagai sebuah prosedur tetap. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari tingginya volume kunjungan, terutama pada periode puncak seperti akhir pekan. Salah satu implementasi konkret dari sistem ini adalah pelaksanaan pembersihan kawasan secara rutin setiap pagi sebelum kedatangan pengunjung, sebuah langkah preventif untuk memastikan area wisata berada dalam kondisi optimal sejak awal operasional. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu prioritas utama yang diperhatikan oleh pihak pengelola maupun masyarakat. Kapalo Banda sebagai destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan menuntut adanya pengelolaan rutin untuk menjaga kenyamanan serta mempertahankan daya tarik kawasan. Oleh karena itu, kegiatan perawatan tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, tetapi menjadi rutinitas harian yang teratur. Salah satu bentuk kegiatan pemeliharaan tersebut terlihat melalui aktivitas membersihkan area wisata sebelum pengunjung datang, hal tersebut disampaikan oleh informan, yaitu Gio (28 Tahun) sebagai ketua pengelola kapalo Banda Taram.

“...Kalo yang di hari pagi setiap hari itu kami membersihkan sampah... sebelum pengunjung datang, kami mengambil sampah terus... karena pengunjung pasti ramai di hari Sabtu Minggu...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gio (28 tahun), gotong royong tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas wisata, tetapi juga menyasar aspek kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Aktivitas pembersihan yang dilakukan setiap pagi sebelum pengunjung datang menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian penting dalam pengelolaan destinasi. Kebiasaan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan Kapalo Banda, tidak hanya untuk kepentingan saat berwisata, tetapi juga menjaga citra tempat agar tetap nyaman bagi pengunjung. Di sisi lain, rutinitas ini menegaskan bahwa masyarakat memaknai wisata bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang harus dijaga secara bersama. Pola kerja yang konsisten dan berulang menggambarkan gotong royong yang terorganisir dan memiliki tujuan jelas, selaras dengan prinsip *communitybased tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana sekaligus penjaga utama keberlangsungan destinasi.



Gambar 1. Kegiatan Gotong Royong

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat masyarakat Kapalo Banda sedang melaksanakan kegiatan gotong royong dengan fokus pada perawatan dan pembuatan tempat duduk di kawasan wisata. Beberapa warga terlihat memperbaiki tempat duduk yang rusak, membuat yang baru, serta menata area sekitarnya agar tetap rapi dan nyaman bagi pengunjung. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, dengan pembagian tugas yang jelas antara kelompok warga sehingga seluruh area dapat terkelola tanpa menumpuk pekerjaan. Selain menjaga fasilitas, aktivitas ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kenyamanan, keamanan, dan kualitas pengalaman pengunjung. Gotong royong ini juga menegaskan nilai sosial yang melekat, seperti solidaritas, tanggung jawab bersama, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Lebih dari sekedar merawat fisik fasilitas, kegiatan ini sekaligus menjadi media pembelajaran sosial bagi masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan, serta menanamkan disiplin dan kepedulian terhadap kelestarian kawasan wisata. Melalui aktivitas rutin ini, masyarakat menunjukkan peran aktif mereka sebagai subjek pengelola wisata, sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan di Kapalo Banda.

Sebagai destinasi wisata alam yang memiliki tingkat kunjungan tingkat tinggi, Kapalo Banda memerlukan sistem pengelolaan kebersihan yang tidak hanya teratur tetapi juga responsif terhadap dinamika kunjungan. Menjaga kualitas lingkungan di kawasan ini bukanlah sekedar aktivitas reaktif terhadap sampah yang sudah terlihat, melainkan suatu upaya terorganisir yang memerlukan perencanaan strategis dan adaptasi terhadap pola kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, di samping rutinitas pembersihan pagi hari yang bersifat preventif, diperlukan juga pengaturan sumber daya manusia yang lebih dinamis saat menghadapi puncak kunjungan, terutama pada akhir pekan. Pembagian tugas yang terstruktur berdasarkan area dan waktu menjadi kunci agar proses pembersihan dapat berjalan lebih efektif, mencakup seluruh wilayah, serta tidak mengganggu pengalaman berwisata. Pendekatan ini memungkinkan pengelola untuk mengoptimalkan tenaga kerja, mencegah penumpukan sampah di titik-titik ramai, dan mempertahankan standar kebersihan secara konsisten meskipun dalam tekanan kunjungan yang tinggi. Strategi operasional ini dijelaskan secara rinci oleh pengelola sebagaimana tercatat dalam wawancara (Gio: 28 Tahun)

“...Pada hari Minggu, kami dibagi menjadi dua kelompok 20 orang fokus membersihkan area dari gerbang hingga ke dalam, dan 20 orang lainnya membersihkan area di dalam Kapalo Banda. Pengelola membagi tugas berdasarkan wilayah agar pekerjaan lebih efektif.” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gio (28 tahun), bahwa gotong royong di Kapalo Banda tidak dilaksanakan secara acak, tetapi diorganisasi melalui pembagian wilayah kerja untuk meningkatkan efektivitas. Sistem pembagian kelompok ini menunjukkan adanya manajemen internal yang sudah berjalan dengan baik, di mana pengelola mampu mengatur tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan. Pembagian area tugas juga mengurangi tumpang-tindih pekerjaan, sehingga kegiatan pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya menjadi sarana kerja bersama, tetapi sudah berkembang sebagai bentuk tata kelola wisata yang berorientasi pada kerapian, efisiensi, serta kenyamanan pengunjung. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *community based tourism*, di mana masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam menjaga dan mempertahankan kualitas destinasi.

Keberhasilan pengelolaan sebuah destinasi wisata sering kali tidak hanya diukur dari fasilitas dan keindahan alamnya, tetapi juga dari bagaimana keberlangsungan kebersihan dan kerapiannya dipertahankan sepanjang hari, terlebih saat menghadapi gelombang kunjungan yang tinggi. Di Kapalo Banda, kondisi lingkungan yang terjaga baik tidak hanya menjadi tanggung jawab formal pengelola, tetapi telah menjadi komitmen bersama yang dijalankan secara rutin dan terstruktur oleh masyarakat setempat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan, yang berjalan di luar aktivitas formal, memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan telah berubah dari sekedar kewajiban operasional menjadi budaya kolektif yang tertanam dalam rutinitas harian. Praktik ini mencerminkan suatu sistem yang berjalan tanpa jeda, dimana proses pembersihan tidak berhenti saat pengunjung mulai datang, namun terus dilakukan sepanjang hari untuk memastikan standar kebersihan tetap terjaga. Dalam konteks pengemabangan pariwisata berbasis komunitas, pola gotong royong seperti ini menunjukkan bagaimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai penjaga kualitas lingkungan yang aktif, berkesinambungan dan responsif terhadap dinamika kunjungan. Salah satu bukti konsistensi ini terungkap dalam wawancara dengan seorang pengunjung (Amel: 30 Tahun)

“...Tempatnya bersih dan selalu terawat. Para pengelola rajin membersihkan meskipun pengunjung ramai. Jadi, meskipun datang pada siang hari, tempatnya tetap rapi...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amel (30 tahun), menunjukkan bahwa konsistensi masyarakat dalam menjaga kebersihan memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan persepsi wisatawan. Kebersihan yang tetap terjaga meskipun jumlah pengunjung tinggi mengindikasikan adanya kesadaran

bersama bahwa lingkungan yang rapi akan mempengaruhi pengalaman berwisata dan tingkat kepuasan pengunjung. Hal ini juga memperlihatkan bahwa gotong royong tidak hanya dipahami sebagai kerja fisik semata, tetapi menjadi sistem kerja sosial yang berjalan secara teratur sebagai bagian dari pengelolaan destinasi. Praktik ini sejalan dengan prinsip *community based tourism*, di mana masyarakat bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pengendali kualitas wisata melalui tindakan nyata seperti menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Dengan demikian, gotong royong di Kapalo Banda tidak hanya mempertahankan nilai tradisi, tetapi telah beradaptasi dengan kebutuhan pariwisata modern melalui tindakan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

Salah satu kunci keberhasilan pariwisata berbasis komunitas adalah sistem pengelolaan keuangan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata, serta menjamin kontinuitas operasional dan pengembangan destinasi. Di Kapalo Banda, aspek keuangan tidak hanya dikelola sebagai urusan administrasi semata, melainkan telah dilembagakan dalam sebuah kerangka yang jelas dan memiliki legitimasi hukum. Institusionalisasi ini penting untuk mencegah potensi konflik yang sering muncul akibat ketidakjelasan dalam pembagian pendapatan dari aktivitas pariwisata. Dengan adanya struktur yang formal, setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak menjadi terdefinisi dengan baik. Pengelolaan yang terstruktur demikian memungkinkan pendapatan wisata tidak hanya dinikmati secara langsung, tetapi juga dialokasikan untuk kepentingan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan masyarakat setempat, yang pada akhirnya memperkuat siklus keberlanjutan destinasi. Mekanisme tersebut diuraikan secara eksplisit oleh Gio (28 tahun), selaku Ketua Pengelola Kapalo Banda Taram:

“....Untuk pembagian hasilnya, 10% diberikan kepada pemuda nagari, 20% untuk pendapatan nagari, 10% untuk dana sosial, dan 60% untuk pihak pengelola. Semua itu sudah diatur oleh wali nagari dalam SK resmi agar tidak terjadi perselisihan di dalam...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan Gio tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembagian hasil telah ditetapkan dengan jelas melalui SK Wali Nagari. Pembagian persentase yang terstruktur menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kapalo Banda tidak berjalan secara informal atau berdasarkan kesepakatan lisan semata, namun sudah dilembagakan secara resmi. Hal ini mencerminkan bahwa pariwisata dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pembagian hasil yang melibatkan pemuda nagari, dana sosial, pendapatan nagari, serta pengelola menjadi bukti bahwa manfaat ekonomi wisata tidak hanya fokus pada satu kelompok, tetapi menyebar kepada berbagai pihak di dalam komunitas. Sistem seperti ini sangat sesuai dengan prinsip *community-based tourism*, di mana pendapatan harus kembali kepada masyarakat. Wawancara ini juga memperlihatkan bahwa pengelolaan yang tertata ini mampu mencegah konflik internal dan memperkuat solidaritas sosial antar masyarakat.

Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak hanya tercermin dari sistem keuangan internal yang transparan, tetapi juga dari kebijakan yang diterapkan terhadap para pelaku ekonomi lokal, khususnya pedagang yang beroperasi di dalam kawasan. Keberadaan pedagang lokal sering kali menjadi bagian integral dari pengalaman wisata, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pengelola dalam menerapkan prinsip pariwisata berbasis komunitas. Kebijakan yang inklusif dan tidak eksploitatif terhadap pedagang, terutama mereka yang berasal dari masyarakat pemilik ulayat, menjadi indikator penting dari keselarasan antara tujuan bisnis pariwisata dengan prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak-hak adat. Dengan tidak membebankan biaya atau mengambil persentase dari pendapatan pedagang lokal, pengelola secara efektif memfasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat setempat sekaligus mengakui hak historis dan kultural mereka atas tanah. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kolaboratif, di mana pengelola berfokus pada perannya sebagai fasilitator dan pengatur tata kelola kawasan, sementara masyarakat memiliki ruang untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada penciptaan ekosistem pariwisata yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Prinsip kolaboratif dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat ini secara tegas diungkapkan oleh Gio (28 tahun), Ketua Pengelola Kapalo Banda Taram.

“....Kalo pedagang yang dalam kawasan ini dari jenjang air itu sampai dalam pada umumnya masyarakat nagari taram tapi yang nganggaleh di luar dekat parkir itu pada umumnya itu banyak pendatang ada malahan dari Bukittinggi dulu, pasar Payakumbuh, Padang Panjang. Yang di dalam itu untuk pengelolaannya, kami tidak pernah membagi persentase dengan para pedagang karena ini adalah tanah mereka. Nah kalau yang diluar itu karena tanah pribadi jadi biasanya bayar 5 ribu langsung bayar ke pemilik lahan. Tugas kami hanya meramaikan agar orang datang serta menata tempat supaya tetap rapi.” (Wawancara, 31 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengelola memiliki posisi yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih kepada mengatur kawasan, menjaga kerapian, serta menarik wisatawan datang. Sikap ini menunjukkan adanya bentuk menghargai terhadap hak-hak adat masyarakat, terutama karena pedagang berjualan di tanah ulayat yang secara adat dimiliki oleh kaum tertentu. Pengelola tidak memaksakan tarif atau pungutan, sehingga pedagang lokal tetap memperoleh ruang ekonomi yang luas. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan wisata Kapalo Banda mengutamakan keadilan dan keberpihakan sosial kepada masyarakat asli. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip CBT yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata. Wawancara ini juga menunjukan bahwa pengelola memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang mendominasi ekonomi wisata, sehingga struktur sosial tetap harmonis

Prinsip inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata Kapalo Banda tidak hanya tercermin pada kebijakan bagi hasil, tetapi juga dalam struktur biaya operasional yang diberlakukan bagi pedagang. Desain kebijakan finansial terhadap pelaku usaha mikro di dalam kawasan merupakan penentu langsung bagi kelangsungan hidup usaha mereka dan secara tidak langsung mempengaruhi daya saing serta keragaman produk yang ditawarkan kepada wisatawan. Dengan meniadakan biaya sewa lahan atau persentase penjualan dan hanya menerapkan kontribusi kebersihan simbolis, pengelola secara strategis mengurangi hambatan masuk (*barrier to entry*) dan beban tetap (*fixed cost*) bagi pedagang. Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang berisiko rendah, memungkinkan keuntungan yang lebih besar dapat dipertahankan oleh pedagang, dan pada akhirnya meningkatkan daya tahan serta pertumbuhan ekonomi rumah tangga lokal. Kebijakan ini berangkat dari pengakuan terhadap status tanah ulayat, yang menggeser paradigma pengelolaan dari orientasi sewa komersial menjadi orientasi pengelolaan bersama berbasis tanggung jawab. Kontribusi kecil yang dikenakan berfungsi lebih sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga fasilitas bersama daripada sebagai sumber pendapatan utama bagi pengelola, sehingga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif. Implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut dijelaskan langsung oleh salah seorang pelaku usaha, Pak An (43 tahun), pedagang makanan dan minuman di kawasan wisata Kapalo Banda.

“...Kami hanya membayar uang kebersihan sebesar dua ribu hingga lima ribu rupiah per hari. Karena ini tanah ulayat, tidak ada biaya sewa lapak, sehingga kami masih bisa mendapatkan keuntungan yang cukup baik...” (Wawancara, 31 Oktober 2025)

Berdasarkan pernyataan Pak An, terlihat jelas bahwa pedagang lokal mengalami peningkatan keuntungan dari sistem pengelolaan wisata ini. Kontribusi kecil berupa uang kebersihan bukanlah bentuk pungutan wajib, melainkan partisipasi untuk menjaga kebersihan kawasan. Tidak adanya biaya sewa membuat pedagang dapat mengalokasikan lebih banyak keuntungan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Pedagang menyatakan bahwa “*untung banyak setiap hari*” memperlihatkan bahwa pariwisata Kapalo Banda menjadi sumber ekonomi baru yang efektif dan ramah masyarakat kecil. Wawancara ini menunjukkan bahwa struktur tanah ulayat bukan hanya warisan adat, tetapi juga faktor penting untuk menjaga keadilan dan keberpihakan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Kinerja keuangan suatu destinasi wisata berbasis komunitas dapat menjadi indikator keberhasilan yang nyata, tidak hanya dari segi pengelolaan internal tetapi juga dalam menarik minat pengunjung. Tingkat pendapatan yang dihasilkan, terutama pola fluktuasinya berdasarkan hari, secara langsung mencerminkan efektivitas strategi pemasaran, daya tarik destinasi, serta kapasitas pengelolaan operasional saat menghadapi puncak kunjungan. Analisis terhadap pendapatan harian memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan finansial organisasi, kemampuan menghasilkan dana untuk operasional, serta potensi kontribusi ekonomi bagi masyarakat melalui skema bagi hasil yang telah ditetapkan. Pendapatan yang signifikan pada akhir pekan menandakan bahwa destinasi telah berhasil memposisikan diri sebagai pilihan rekreasi utama, sementara pendapatan yang stabil pada hari biasa menunjukkan adanya basis pengunjung yang berkelanjutan. Pemantauan terhadap arus kas harian ini juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis, alokasi anggaran, dan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang diterapkan. Realitas finansial tersebut dijelaskan secara kuantitatif oleh Gio (28 tahun), selaku Ketua Pengelola Kapalo Banda Taram.

“...Pendapatan per hari berkisar antara 800 ribu hingga 1 jutaan rupiah. Pada hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 8 hingga 10 juta rupiah. Pendapatan tersebut dibagi setiap hari sesuai dengan SK yang berlaku...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa wisata Kapalo Banda memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di hari-hari ramai. Pendapatan yang mencapai 8–10 juta pada akhir pekan menunjukkan bahwa wisata ini telah menjadi aset ekonomi penting bagi nagari. Pembagian pendapatan yang dilakukan setiap hari juga memastikan bahwa distribusi manfaat berjalan secara cepat, transparan, dan sesuai dengan

aturan yang ditetapkan. Hal ini membuat proses keuangan tidak tertunda dan memungkinkan masyarakat merasakan hasilnya secara langsung. Sistem pembagian harian ini merupakan faktor lain bahwa pengelolaan Kapalo Banda dilakukan secara efektif dan profesional meskipun berbasis komunitas. Wawancara ini menunjukkan bahwa keberhasilan destinasi tidak hanya bertumpu pada potensi alam, tetapi terutama pada kelembagaan dan manajemen keuangan yang tertib.

Kelompok Usaha Masyarakat Lokal sebagai Penggerak Ekonomi

Adaptasi masyarakat terhadap peluang ekonomi dalam pariwisata seringkali ditandai dengan transformasi fungsi sumber daya dan keterampilan lokal menjadi produk yang memiliki nilai jual baru. Fenomena ini tercermin pada atraksi rakit di Kapalo Banda Taram, di mana terjadi pergeseran nilai ekonomi yang signifikan. Rakit, yang sebelumnya berfungsi sebagai alat transportasi dan alat produksi dalam aktivitas ekstraktif seperti mencari kayu di hutan (*rimbo*), kini telah bertransformasi menjadi aset modal dan produk wisata inti. Transformasi ini merepresentasikan peralihan dari ekonomi subsisten berbasis ekstraksi sumber daya alam menuju ekonomi jasa berbasis pengalaman (*experience-based economy*) yang lebih berkelanjutan. Nilai ekonomi tidak lagi dihasilkan dari komoditas yang diangkut (kayu), tetapi dari pengalaman wisata yang dijual. Pergeseran ini mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan sekaligus menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi karena bergantung pada kunjungan wisatawan, bukan pada ketersediaan sumber daya alam yang dapat habis. Dengan demikian, atraksi rakit menjadi contoh nyata bagaimana inovasi berbasis kearifan lokal dapat menciptakan mata pencaharian alternatif yang mendukung konservasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Hal ini disampaikan oleh Gio (28 tahun) selaku ketua pengelola Kapalo Banda Taram.

“...Dulu masyarakat pergi ke hutan untuk mencari kayu. Setelah adanya Kapalo Banda, dibukalah wahana rakit sebagai atraksi wisata. Sekarang para pemilik hanya memasukkan rakit pada pagi hari, lalu sore hari mengambilnya kembali, dan mereka sudah menerima upah...”
(Wawancara 31 Oktober 2025).

Berdasarkan pertanyaan Gio di atas, terlihat bahwa pengembangan wisata Kapalo Banda telah mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat lokal. Sebelumnya masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk mencari kayu, saat ini mereka beralih menjadi penyedia atraksi wisata. Aktivitas yang dahulu bersifat fisik dan berisiko berubah menjadi pekerjaan yang lebih aman, stabil, serta memberikan pemasukan harian melalui sektor wisata. Pengelolaan wisata berkembang menjadi usaha yang lebih terarah dan memiliki nilai ekonomi. Perubahan ini menunjukkan adanya proses adaptasi sosial ekonomi masyarakat terhadap perkembangan pariwisata. Masyarakat mampu melihat peluang dari potensi lokal yang dimiliki dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan pekerjaan sebelumnya.



Gambar 2. Atraksi Rakit

Sumber: Pengelola Kapalo Banda

Keberhasilan suatu model Community-Based Tourism (CBT) dapat diukur secara kuantitatif melalui tingkat partisipasi dan transformasi mata pencaharian yang terjadi di tingkat rumah tangga. Partisipasi yang luas, yang ditandai dengan banyaknya keluarga yang terlibat secara langsung dalam kepemilikan aset wisata, merupakan indikator kuat dari pemerataan manfaat ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Pergeseran pekerjaan dari sektor primer ekstraktif yang seringkali berisiko dan tidak stabil menuju sektor jasa pariwisata yang lebih terstruktur mencerminkan peningkatan ketahanan ekonomi komunitas. Diferensiasi mata pencaharian ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya alam, sehingga berkontribusi pada konservasi lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi jangka panjang. Struktur pengelolaan di mana aset dimiliki masyarakat tetapi beroperasi di bawah koordinasi dan pengawasan sebuah lembaga pengelola utama menunjukkan model kemitraan yang ideal dalam CBT, yang menyeimbangkan antara otonomi usaha mikro dengan standar operasional, pemasaran, dan kontrol kualitas yang terpusat untuk kepentingan bersama. Dinamika partisipasi dan transformasi ekonomi ini

dijelaskan dalam wawancara dengan seorang informan, hal tersebut disampaikan oleh informan, yaitu Gio (28 Tahun) sebagai ketua pengelola kapalo Banda Taram.

“...Rakit yang ada di Kapalo Banda dikelola oleh masyarakat sekitar, namun tetap berada di bawah pengawasan pengelola utama. Saat ini sudah ada sekitar 30 KK yang memiliki rakit. Dahulu, sebagian besar dari mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu, tetapi sejak Kapalo Banda dijadikan kawasan wisata, mereka beralih menjadi pengelola rakit sebagai wahana wisata...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Gio (28 tahun) bahwa perubahan sosial ekonomi masyarakat Nagari Taram setelah Kapalo Banda berkembang sebagai kawasan wisata. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup sebagai pencari kayu di hutan, namun kini terjadi pergeseran fungsi ekonomi menjadi penyedia jasa wisata melalui pengelolaan rakit. Tercatat lebih dari 30 kepala keluarga memiliki rakit dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan baru. Perubahan ini menunjukkan bagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat menciptakan sumber penghasilan baru yang berkelanjutan tanpa merusak alam. Sebelum dijadikannya kapalo banda sebagai desa wisata, sebagian masyarakat bekerja sebagai pencari kayu ke hutan. Namun setelah ada aktivitas wisata di kapalo banda masyarakat yang sebelumnya menjadi pencari kayu ke hutan bergeser menjadi pemilik rakit dan menjadi bagian dari aktivitas wisata sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil.

Tanah Ulayat dan Kontribusi Sukarela sebagai Fondasi Ekosistem Ekonomi

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan fondasi kelembagaan yang mampu mencegah praktik ekstraksi ekonomi berlebihan terhadap sumber daya komunitas. Dalam konteks ini, sistem pengelolaan lahan berdasarkan prinsip tanah ulayat muncul sebagai landasan kritis yang mentransformasi logika ekonomi pariwisata dari model berbasis sewa (*rent-based*) menjadi model berbasis hak akses kolektif (*access-based*). Kebijakan tidak menerapkan biaya sewa atau retribusi atas pemanfaatan lahan bagi masyarakat pemilik, sebagaimana diterapkan di Kapalo Banda, merupakan instrumen ekonomi non-ekstraktif yang strategis. Kebijakan ini secara efektif mengeliminasi komponen biaya produksi terbesar bagi pelaku usaha lokal, yaitu biaya sewa lahan sehingga secara langsung meningkatkan margin keuntungan dan daya saing usaha mikro. Dengan menggeser fokus dari pendapatan sewa ke peningkatan nilai tambah ekonomi kolektif, tanah ulayat berfungsi sebagai commons produktif yang mengutamakan multiplikasi manfaat ekonomi di dalam komunitas, bukan akumulasi pendapatan bagi suatu entitas pengelola. Pendekatan ini tidak hanya merefleksikan penghormatan terhadap adat, tetapi juga membangun kerangka ekonomi yang lebih resilien dan inklusif, dimana akses terhadap faktor produksi (lahan) tidak menjadi penghalang. Melainkan pemicu partisipasi ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan Gio (28 tahun) menjelaskan bahwa

“...Untuk pedagang yang ada di dalam yang arah kehutan pinus itu mereka yang berada di bagian dalam adalah pemilik lahan, karena kawasan tersebut merupakan tanah ulayat. Jadi, mereka sama sekali tidak dikenai biaya...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan dalam kawasan wisata didasarkan pada prinsip tanah ulayat yang merupakan hak bersama masyarakat adat Pemilik lahan memberikan izin pemanfaatan tanpa memungut biaya, karena mereka memahami bahwa wisata Kapalo Banda merupakan sumber milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama-sama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa keberhasilan wisata tidak hanya menguntungkan pengelola, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Nagari Taram.

Partisipasi finansial masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata tidak selalu harus bersifat wajib dan bernilai tinggi untuk menjadi efektif. Di Kapalo Banda, mekanisme kontribusi kebersihan sukarela dengan nominal yang sangat kecil mencerminkan suatu pendekatan ekonomi kelembagaan yang canggih, dimana tujuan utamanya bukanlah pengumpulan dana, tetapi pembentukan dan penguatan modal sosial serta komitmen kolektif. Dengan menetapkan sumbangan yang ringan dan bersifat tidak memaksa, sistem ini mengubah transaksi ekonomi biasa menjadi sebuah ritual partisipasi simbolis. Nilai Ekonomi nominalnya yang rendah justru menjadi sebuah ritual partisipasi simbolis. Nilai Ekonomi nominalnya yang rendah justru menjadi kekuatan, karena memastikan inklusivitas, setiap pedagang dan pelaku usaha, terlepas dari skala pendapatannya, dapat berkontribusi tanpa terbebani. Fungsi utama mekanisme ini bergeser dari pendanaan operasional (yang mungkin telah ditanggung oleh sumber pendapatan lain seperti tiket) ke arah pembangunan rasa kepemilikan bersama (*Shared ownership*) dan akuntabilitas moral. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, berfungsi sebagai pengikat psikologis dan sosial yang mengingatkan semua pihak akan

tanggung jawab mereka untuk menjaga kebersihan sebagai barang publik (Public good) yang mereka nikmati bersama. Hal ini disampaikan oleh informan Gio (28 tahun) yang menjelaskan bahwa

“...Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar 2 ribu atau 5 ribu rupiah sebagai sumbangan setiap hari itu pun kalau misal lagi sepi di hari kerja atau memang kapalo banda lagi kering tidak ada air otomatis pengunjung tidak ramai jadi tidak mungkin juga kami meminta uang kebersihan ...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa kontribusi pengunjung terhadap kebersihan bukanlah bentuk pungutan wajib, tetapi lebih kepada dukungan simpatisan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan wisata. Nominal yang kecil menunjukkan bahwa sistem ini dirancang agar bisa dijangkau semua pengunjung, sekaligus memastikan bahwa area wisata tetap terawat tanpa membebani masyarakat maupun wisatawan.

Keberhasilan suatu model ekonomi berbasis komunitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan kotor, tetapi terutama dari kemampuannya meningkatkan margin keuntungan bersih pelaku usaha mikro. Faktor kunci yang menentukan margin tersebut adalah struktur biaya tetap, di mana biaya sewa lahan sering menjadi komponen terbesar yang mengurangi daya saing usaha skala kecil. Kebijakan pengelolaan di Kapalo Banda yang menerapkan sistem nirlaba atas tanah ulayat secara strategis mengeliminasi biaya produksi primer ini, menciptakan lingkungan usaha dengan struktur biaya variabel rendah. Pendekatan ini mentransformasi potensi pendapatan sewa yang biasa menjadi hak institusi menjadi insentif ekonomi langsung bagi pelaku usaha, sehingga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga. Implementasi kebijakan ini disampaikan secara gamblang oleh informan Gio (28 tahun)

“...Keuntungannya besar, dan tidak ada biaya sewa, hanya membayar uang kebersihan. Hal ini sangat membantu perekonomian keluarga karena kan tanah ini milik keluarga mereka jadi kami tidak mungkin juga mintak sewa lapak yang ada nanti jadi konflik ...” (Wawancara, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan Kapalo Banda memberikan ruang usaha yang relatif bebas biaya bagi masyarakat. Tidak adanya biaya sewa lokasi membuat pedagang atau pengelola lapak dapat memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan jika mereka harus membayar retribusi formal. Mereka hanya mengeluarkan kontribusi kecil berupa uang kebersihan harian, sehingga keuntungan yang didapatkan dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menggambarkan bahwa wisata Kapalo Banda menjadi sumber mata pencaharian yang berarti bagi masyarakat sekitar. Pendapatan yang stabil, ditambah rendahnya beban operasional, menjadikan usaha di kawasan wisata ini sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan wisata berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi yang merata, tidak hanya menguntungkan pengelola tetapi juga pedagang lokal dan masyarakat yang terlibat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata Kapalo Banda merupakan contoh nyata penerapan Community Based Tourism (CBT) yang tumbuh melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal. Penerapan seperti ini sejalan dengan temuan (Jumiati et al., 2023) yang menunjukkan bahwa CBT dan kemitraan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penelitian (Vidya et al., 2022) yang membuktikan bahwa CBT dapat mendorong pemberdayaan sosial ekonomi melalui peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas hidup, dan tumbuhnya rasa bangga masyarakat. Selain itu, penelitian (Aina & Manurung, 2022) juga menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat cenderung memperoleh penilaian baik pada pelayanan, fasilitas, dan atraksi wisata. Dengan demikian, praktek CBT di Kapalo Banda sejalan dengan berbagai temuan tersebut.

Pengelolaan ini tercermin dari kegiatan harian pengelola yang secara rutin menjaga kebersihan sebelum pengunjung datang. Setiap pagi, sampah dikumpulkan, aliran air diperiksa, dan area wisata ditata agar tetap nyaman dan aman. Rutinitas ini menggambarkan komitmen masyarakat terhadap kualitas wisata, sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab moral mereka sebagai pemilik kawasan. Ketika jumlah pengunjung meningkat pada akhir pekan, masyarakat membagi diri ke dalam kelompok-kelompok kerja untuk menangani area berbeda. Pola pembagian ini merupakan bentuk aturan kerja internal yang efektif, sehingga seluruh bagian kawasan baik dari gerbang hingga area dalam dapat terjaga tanpa menimbulkan penumpukan pekerjaan. Temuan ini juga melengkapi penelitian (Adria dan Yuliana, 2023) yang menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas, namun belum membahas secara mendalam bagaimana keterlibatan komunitas dalam rutinitas pemeliharaan harian.

Selain pemeliharaan rutin, masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan setiap hari Jumat. Pada hari tersebut, fokus tidak hanya pada kebersihan, tetapi juga peningkatan fasilitas wisata. Tempat duduk yang rusak diperbaiki atau diganti, jalur wisata yang berlubang diperbaiki, area hijau ditata, dan spot foto ditambah sesuai kebutuhan pengunjung. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap kunjungan wisata dan mampu menyesuaikan pengembangan sesuai kebutuhan lapangan. Praktik ini mendukung temuan [Utami et al \(2022\)](#) tentang pentingnya inisiatif lokal dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

Aspek penting lainnya adalah berkaitan dengan tanah ulayat, yang merupakan dasar pengelolaan lahan wisata. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan secara bebas, sehingga setiap perubahan atau pemanfaatan lahan harus disepakati oleh pemilik ulayat dan ninik mamak. Mekanisme adat ini memastikan bahwa pengembangan wisata tidak merugikan masyarakat, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tetap berada dalam pengawasan pemilik tanah ulayat. Sistem adat ini bukan hanya menjaga keberlanjutan ekologis kawasan hutan dan air, tetapi juga memastikan bahwa nilai budaya tetap terjaga. Hal ini memperkuat argumen penelitian-penelitian CBT sebelumnya bahwa keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat selalu berkaitan dengan kuatnya lembaga adat dan nilai lokal.

Pengelolaan wisata Kapalo Banda memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Nagari Taram. Sumber pendapatan tidak hanya berasal dari atraksi rakit, tetapi juga meliputi tiket masuk, parkir, kantin, penyewaan fasilitas, dan jasa pemandu wisata. Sistem bagi hasil yang diterapkan, termasuk alokasi untuk pemuda nagari, dana sosial, pendapatan nagari, serta pengelola, memastikan distribusi manfaat ekonomi berlangsung adil dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga warga, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Praktik Community Based Tourism (CBT) di Kapalo Banda berjalan efektif melalui sistem bagi hasil yang disepakati bersama antara pengelola dan pemerintah nagari, dengan pembagian pendapatan: 10% untuk pemuda nagari, 20% untuk pendapatan nagari, 10% untuk dana sosial, dan 60% untuk pengelola, sehingga 30% disetor ke nagari dan 70% dikelola langsung oleh pengelola lapangan. Skema ini memastikan manfaat ekonomi pariwisata dirasakan secara merata, sekaligus memperkuat fungsi sosial melalui alokasi dana sosial. Bagi sekitar 40 orang pengelola, sistem ini memberikan pendapatan rata-rata Rp2.000.000–Rp3.000.000 per bulan meskipun bekerja hanya sekitar 15 hari per bulan. Namun, sistem ini juga menunjukkan kerentanan saat kunjungan menurun, misalnya pada musim kering ketika debit air rendah sehingga pendapatan pengelola turun hingga sekitar Rp1.000.000, dan pedagang lokal pun merasakan dampaknya. Secara keseluruhan, pola bagi hasil ini mencerminkan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yang transparan, inklusif, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal.

Selain berdampak terhadap ekonomi masyarakat lokal, pengelolaan Kapalo Banda berbasis komunitas memberikan dampak sosial yang besar bagi masyarakat Nagari Taram. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pemeliharaan fasilitas, dan pengawasan destinasi meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas sosial antar masyarakat. Selain itu, sistem partisipatif ini memperkuat kapasitas organisasi lokal, khususnya Karang Taruna, dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan wisata. Aktivitas bersama yang terstruktur seperti pembersihan rutin, pembangunan fasilitas, dan pengelolaan atraksi wisata tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti disiplin, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dampak sosial lainnya terlihat dari peningkatan interaksi lintas generasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam serta budaya lokal, sehingga destinasi wisata berfungsi sebagai ruang pendidikan sosial sekaligus media pelestarian budaya dan lingkungan.

Pengelolaan Kapalo Banda berbasis komunitas juga memberikan dampak positif yang nyata terhadap pelestarian lingkungan. Kegiatan rutin seperti gotong royong, pembersihan sampah harian, penghijauan, dan pemeliharaan fasilitas memastikan kawasan wisata tetap bersih, rapi, dan asri. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko kerusakan alam akibat tingginya kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan kualitas ekosistem lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya konservasi alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, tata kelola yang terstruktur, seperti pembagian area kerja dan pengaturan sumber daya manusia saat puncak kunjungan, memungkinkan pengelolaan lingkungan berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan wisata berbasis komunitas di Kapalo Banda tidak hanya mempertahankan nilai estetika alam, tetapi juga membentuk budaya kepedulian lingkungan yang berkelanjutan.

Dukungan pemerintah, baik dari tingkat nagari memperkuat berjalannya wisata melalui bantuan seperti penyediaan akses jalan, serta pendampingan administrasi. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengembangkan potensi wisata tanpa mengambil alih kewenangan. Pola ini selaras

dengan temuan (Aina & Manurung, 2022) bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan destinasi berbasis komunitas.

Dalam kerangka teori agency, masyarakat Kapalo Banda dapat dipahami sebagai aktor sosial yang memiliki kemampuan bertindak dalam membentuk pengelolaan wisata. Agency berarti bahwa individu atau kelompok bukan sekadar mengikuti struktur, tetapi memiliki kemampuan reflektif untuk menilai situasi, mengambil keputusan, dan mengubah struktur melalui tindakan. Tindakan masyarakat dalam membentuk aturan internal, membagi wilayah kerja, memutuskan prioritas pembangunan, hingga menentukan tata kelola pendapatan menunjukkan kapasitas mereka sebagai agen. Struktur sosial seperti adat, sistem tanah ulayat, norma gotong royong, dan kerangka kebijakan pemerintah memang menjadi landasan, tetapi masyarakat tidak pasif terhadap struktur tersebut. Mereka memanfaatkannya sebagai legitimasi, sekaligus menyesuaikan aturan agar sesuai kebutuhan pengembangan wisata. Analisis ini sekaligus memperdalam temuan (Aina & Manurung, 2022) yang menguraikan peran masyarakat sebagai pemrakarsa, pelaksana, penyerta, pengawas, dan penerima manfaat, namun belum masuk pada mekanisme operasional tindakan dan agen masyarakat sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

Konsep agency juga terlihat dari bagaimana masyarakat merespons perubahan jumlah kunjungan, kebutuhan fasilitas baru, serta tantangan pengelolaan lingkungan. Munculnya inovasi seperti penataan jalur wisata, pembagian kelompok kerja, serta penambahan fasilitas merupakan hasil refleksi tindakan masyarakat terhadap kondisi yang mereka hadapi. Dalam konteks teori strukturasi (Kritis et al., 2012), masyarakat tidak hanya dibentuk oleh struktur, tetapi pada saat yang sama membentuk struktur baru melalui tindakan dan keputusan mereka sendiri.

Penjelasan mengenai penerapan CBT dan teori agency tersebut memperlihatkan alasan kuat mengapa Kapalo Banda dapat disebut sebagai pariwisata berkelanjutan. Keberlanjutan di kawasan ini tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, kegiatan pembersihan harian, pengaturan aliran air, dan pemeliharaan kawasan memastikan bahwa penggunaan ruang wisata tidak merusak ekosistem. Keteraturan gotong royong dan rotasi kerja menciptakan mekanisme yang mampu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dari sisi sosial dan budaya, keberlanjutan tercermin dari penguatan nilai gotong royong, pemanfaatan tanah ulayat, serta keterlibatan ninik mamak dalam pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa wisata tidak menghilangkan identitas lokal, melainkan justru memperkuatnya. Keberlanjutan sosial juga terlihat dari distribusi manfaat ekonomi yang dinikmati secara kolektif oleh pengelola, sehingga hasil wisata tidak hanya terpusat pada individu tertentu. Dari sisi ekonomi, keberlanjutan terwujud karena masyarakat memperoleh pendapatan rutin dari tiket masuk, jasa pemanduan, warung, dan fasilitas tambahan. Pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali untuk pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, menciptakan siklus ekonomi internal yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keuntungan ekonomi tidak merusak aspek lingkungan dan budaya, tetapi justru mendukung kelestarian kawasan. Keseluruhan proses ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan Kapalo Banda terbangun melalui interaksi kuat antara agen (masyarakat) dan struktur (adat, kebijakan, dan nilai sosial) yang saling memperkuat. Oleh karena itu, Kapalo Banda dapat dipahami sebagai model pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat nilai budaya lokal, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Nagari Taram berperan aktif dalam pengelolaan wisata Kapalo Banda melalui CBT, termasuk pemeliharaan rutin, gotong royong, pembangunan fasilitas, dan pengambilan keputusan. Pendapatan dari tiket masuk, jasa pemanduan, dan fasilitas tambahan dikelola transparan, sebagian disalurkan untuk program sosial dan pemuda nagari. Keterlibatan ini meningkatkan kebersamaan, solidaritas, kapasitas lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Sinergi antara masyarakat, adat, dan kebijakan pemerintah menjadikan Kapalo Banda pariwisata berkelanjutan yang melestarikan alam, budaya, dan memberi manfaat ekonomi jangka panjang.

Rujukan

Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan ketiga Antony Giddens Anatomy of Structuration Theory and Ideology of the Third way of Anthony Giddens. *Jurnal Translitera*, 9(2).

-
- Aina, R. & Manurung, S. (2022a). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Objek Wisata Tangkahan. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(3), 148–154. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i3.845>
- Alwajih, A. (2012). Jurnalisme Profesional Pilar Demokrasi?: Analisis Kritis Perspektif Anthony Giddens. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 73-84.
- Eko, P. (2022). Integrasi Teori Strukturasi Anthony Giddens dan Kajian Feminis pada Kebijakan Sumber Daya Manusia di Tempat Kerja. *Dekonstruksi*, 7(01), 136-159..
- Jumiati, J., Saputra, B., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Examining the mediating effects of social capital and community-based tourism on the role of tourism villages in sustainable tourism. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 15(1), 176-193.
- Suhaimi, S. N., Putri, T. A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Mekarsari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2), 160-173.
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802-4821.
- Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). Implementasi Community-Based Tourism sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 159–171. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>
- Utami, V. Y., Yusuf, S. Y. M., & Mashuri, J. (2022). Penerapan Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 3(3), 219-226.
- Wahyudi, T. T., Awalia, H., & Hilmi, F. (2024, December). Peran Agen dan Struktur dalam Pengembangan Desa Wisata pada Masyarakat Pesisir Pantai Desa Labuhan Kertasari. Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi) (Vol. 5, No. 1, pp. 82-94).
-